

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) MENURUT HUKUM
PERTANAHAN INDONESIA DI KOTA BLITAR

(Studi Di Kantor Pertanahan Kota Blitar)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

GRACIA ISTADY

NIM 115010107113034



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA
(PRONA) MENURUT HUKUM PERTANAHAN
INDONESIA DI KOTA BLITAR (Studi di Kantor
Pertanahan Kota Blitar)**

Identitas Penulis

:


- a. Nama : Gracia Istady**
- b. NIM : 115010107113034**
- c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : -

Disetujui pada tanggal : 25 Juli 2018

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Lutfi Effendi, SH., MHum
NIP : 19600810 198601 1 002


Agus Yulianto, SH., MH
NIP : 19590717 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Lutfi Effendi, SH., MHum
NIP : 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)
MENURUT HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DI KOTA BLITAR
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Blitar)

Oleh:

GRACIA ISTADY

NIM. 115010107113034

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : **26 OCT 2018**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH., MHum
NIP. 19600810 198601 1 002



Agus Yulianto, SH., MH
NIP. 19590717 198601 1 001

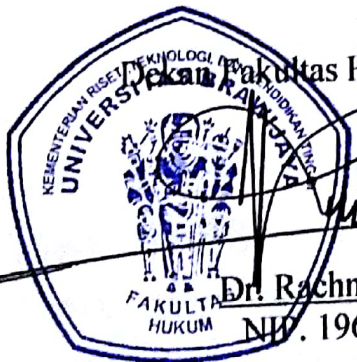
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., MHum
NIP : 19600810 198601 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 674/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : GRACIA ISTADY
NIM : 115010107113034
Judul : HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
NASIONAL AGRARIA (PRONA) SECARA GRATIS DI KOTA BLITAR
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Blitar)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB



RINGKASAN

GRACIA ISTADY, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, ***PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) MENURUT HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DI KOTA BLITAR*** (*Studi di Kantor Pertanahan Kota Blitar*), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Prona merupakan program pemerintah yang semua anggaran ditanggung APBN. Program sertifikasi Prona bisa dikatakan gratis alias tidak ada biaya karena biaya penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan Sertifikat semua telah ditanggung APBN. Prona diutamakan bagi warga ekonomi menengah ke bawah yang jelas-jelas tidak mampu mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Meskipun biaya pendaftaran tanah ini dilakukan secara gratis, dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan Kantor Pertanahan Kota Blitar masih menemui hambatan-hambatan dalam melaksanakan program Prona tersebut. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Prona menurut hukum Pertanahan dan bagaimana cara Kantor Pertanahan Kota Blitar mengatasinya demi tercapainya pelaksanaan Prona.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan, mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar menurut hukum Pertanahan dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yaitu pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dari penelitian disimpulkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam melaksanakan Prona terdiri dari hambatan eksternal (kinerja terkait) dan hambatan internal (dari dalam Kantor Pertanahan).

SUMMARY

GRACIA ISTADY, State Administrative Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2018, **EXECUTION OF AGRARIAN NATIONAL PROGRAM (PRONA) ACCORDING TO INDONESIAN LAND LAW IN BLITAR** (A study in Land Office in Blitar), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Certification program held by Agrarian National Program (hereinafter Prona) is covered in State Budget (APBN) by the government. In other words, it can be said that this program is free of charge as there is no fee required for the workshop, data collection (proof/notarial deed), land measurement, land examination, issuance of letter information juridical and physical data verification, and certificate issuance since all items were covered in the state budget. This program is specialised for those living at middle to low economic levels at which the people cannot afford to get the certificate. Beyond this free of charge program, there are, however, several issues encountered in executing this Prona. This research is aimed to discuss the execution of Prona program according to land law and measures taken by the land office in Blitar to tackle the issues arising to achieve the success of the program.

This research is also aimed to find, know, and describe the execution and impeding factors that may arise in National Land Agency in Blitar according to land law in relation to the execution of Agrarian National Program (Prona). This research involved socio-juridical approach in which secondary data was collected, followed by primary and other forms of data obtained from observed field. The research results indicate that external factor (regarding performance) and internal ones (coming from the land office itself) are the two hampering factors faced by National Land Agency in Blitar.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) MENURUT HUKUM PERTANAHAN INDONESIA DI KOTA BLITAR** (Studi di Kantor Pertanahan Kota Blitar).” Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan doa dari berbagai pihak.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfie Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak Nurdin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Hidayat dan Ibu Anna Yunita P. selaku kedua Orang Tua, atas segala bantuan moril, material, arahan, kasih sayang dan selalu mendoakan keberhasilan selama menempuh pendidikan.
6. Bapak Pdt. Dr. Ki Bagus Heruyono selaku Orang Tua rohani, atas segala motivasi dan mendoakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan.
7. Hari Purnomo selaku kakak rohani atas perhatian, dukungan, motivasi serta doanya.
8. Teman-teman “Team Positive Thinking” (Merlinda Adista, Silviana, Dila, Desy, Agung Nugroho, Zefanya, Sandi) serta Boarnega Sahadhuta atas dukungan dan motivasi, kebersamaan selama ini untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Semua teman-teman dan berbagai pihak yang telah membantu, tetapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga segala

apa yang telah tercapai dan ilmu yang didapatkan bisa membuat penulis menjadi seorang yang berguna bagi keluarga serta bagi nusa dan bangsa.

Malang, 25 Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

Cover

Halaman Persetujuan..... i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi..... v

Daftar Tabel viii

Ringkasan ix

Summary x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pendaftaran Tanah.....	13
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.....	14
2. Penerbitan Sertifikat	15
3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	20
4. Asas Dan Tujuan Pendaftaran Tanah	21
5. Obyek Pendaftaran Tanah	22
6. Sistem Pendaftaran Tanah	23
7. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah	25
8. Biaya Pendaftaran Tanah	28

9. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	30
B. Kajian Umum Tentang Program Nasional Agraria.....	30
1. Latar Belakang Pelaksanaan Program Nasional Agraria	31
2. Kriteria Subyek Proyek Operasi Nasional Agraria	34
3. Kriteria Penetapan Lokasi	35
4. Kriteria Obyek Proyek Nasional Agraria	36
5. Luas dan Jumlah Tanah Obyek Program Nasional Agraria	36
6. Tahapan Pelaksanaan Program Nasional Agraria	37
7. Sumber Biaya Proyek Program Nasional Agraria	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Jenis Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Populasi Dan Sampel	42
G. Teknik Analisis Data	42
H. Definisi Operasional	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria Secara Gratis di Kota Blitar	53
1. Hambatan Intern.....	53
2. Hambatan Ekstern	53
C. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Nasional Agraria Secara Gratis di Kota Blitar	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
---------------------	----

B. Saran.....	60
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Rincian Jumlah Kelurahan dan Luas Masing-Masing Kecamatan di
Kota Blitar 46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara Republik Indonesia, yang terkenal dengan “negara agraris” maka sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya memiliki fungsi yang sangat berperan sangat penting bagi membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga segala jenis kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia, seperti misalnya air, tanah dan bahan tambang secara keseluruhan menjadi hak Bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan pembangunan segala bidang kehidupan maka tanah menjadi hal penting dalam pembangunan tersebut. Karena untuk membuat lahan pertanian, kompleks perumahan dan berbagai jenis pembangunan, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan tanah.

Dalam arti yuridis, tanah digunakan sebagai pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa, “Dengan adanya dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki orang-orang”. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam pengertian yuridis, tanah adalah permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dimiliki orang dengan hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya tanah dengan hak-hak tersebut tidak

bermakna jika penggunaannya terbatas karena tanah sebagai permukaan bumi saja.¹

Objek hukum tanah adalah penguasaan hak atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang hak agar berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang menjadi, hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret.² Hukum Agraria Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Kebijakan pertanahan nasional yang dirumuskan pada Pasal 33 ayat(3) UUD NRI 1945 tersebut di atas didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa Indonesia yang sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara yang pada intinya dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan berbagai segi penguasaan tanah yang sejak semula menurut sifatnya selalu dianggap sebagai tugas pemerintah pusat.³

¹ Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya**, Jilid 1, Djambatan, Jakarta, 2008, Hlm. 18

² Effendi Perangin, **Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, Cet. III, Rajawali, Jakarta, 1991, Hlm. 195

³ Arie Sukanti Hutagalung, dan Markus Gunawan, **Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 57

UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang lahir berdasarkan pasal tersebut mengatur hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, luar angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hubungan hukum agraria negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia adalah atas dasar hak menguasai. Tujuan dari memberikan hak menguasai kepada negara ialah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut pejabat)”.

Dalam Pasal ini, Pejabat yang dimaksud adalah PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta yang dibuat oleh PPAT adalah salah satu bukti hak atas tanah yang digunakan untuk kelengkapan di Kantor Pertanahan. Jadi, akta yang dibuat oleh PPAT sangat penting artinya dalam proses pendaftaran tanah. Seiring dengan kepentingan masyarakat yang semakin beragam, maka Pemerintah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan dari PP sebelumnya. (PP No. 10/1961).

Sebagaimana yang disebutkan pada PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Pendaftaran Tanah bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁴”

Tujuan pendaftaran tanah yang terdapat dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 ialah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, dan untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar serta terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁵

Selain itu untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, ditegaskan bahwa sertifikat adalah alat bukti yang sangat kuat bagi pemilik tanah sehingga orang lain tidak akan menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau atas nama badan hukum. Akan tetapi apabila selama lima tahun sejak sertifikat terbit tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan

⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

atau tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sedangkan tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dan secara fisik nyata menguasainya. Selama belum dibuktikan, seluruh data yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar dan baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun sesuai sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dengan demikian sertifikat sebagai alat jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertian Sertifikat adalah salinan buku tanah, surat ukur yang telah dijilid menjadi satu dengan suatu kertas bersampul dan yang telah ditetapkan dengan peraturan menteri.

Sebuah sertifikat tidak dengan begitu saja diberikan kepada seseorang yang memiliki hak atas tanah, tapi diberikan juga kepada yang bersangkutan apabila memerlukannya. Kepemilikan suatu sertifikat tanah baru bisa diperoleh melalui proses pendaftaran hak kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional, karena dengan didaftarkan tanah, maka akan diketahui status tanah tersebut.

Namun pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia belum diikuti pemahaman yang baik oleh masyarakat, masih banyak tanah milik masyarakat yang belum bersertifikat. Banyaknya tanah di Indonesia yang belum bersertifikat tentunya disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat malas mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat memerlukan waktu yang cukup lama serta prosedur yang berbelit-belit juga biaya yang mahal merupakan faktor yang tidak dapat dipungkiri. Selain itu juga ada masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum rendah dapat pula mempengaruhi masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya.

Dengan adanya keadaan seperti itu, Pemerintah mengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Program Nasional Agraria yang dipakai sebelumnya oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona) dimana Proyek ini diharapkan dapat mengatasi kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. Tujuan Proyek ini adalah usaha untuk berpartisipasi untuk menciptakan stabilitas sosial politik serta pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu kegiatan penting untuk menunjang berhasilnya proyek ini adalah perlunya dilakukan usaha-usaha untuk membina pengertian dan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya proyek ini melalui penyuluhan secara luas dengan berbagai macam cara dan sarana yang ada. Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, maka hak atas tanah tidak akan selamanya terus melekat pada pemegangnya karena adanya pemindahan hak yang disebabkan oleh kepentingan yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pelaksanaan Prona yang diadakan oleh pemerintah dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang kepemilikan tanah. Sehingga pemegang hak atas tanah tidak ragu untuk mensertifikatkan tanahnya khususnya untuk golongan ekonomi lemah dan ekonomi menengah. Selain itu Proyek ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.

Selanjutnya Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya lembaga institusi yang sampai saat ini diberikan kewenangan dalam mengelola bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program penyelenggaraan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan, dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan lembaga ini salah satu misinya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.⁶

BPN memiliki tugas yang sangat penting, yaitu sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional :

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas, melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Serta fungsinya:

1. Perumusan-perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
2. Perumusan-perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan serta program-program di bidang pertanahan.

⁶ Yudhi Setiawan, **Hukum Pertanahan Teori Dan Praktik**, Bayumedia, Malang, 2010, Hlm. 44

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggara dan pelaksana survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksana pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan seluruh hak atas tanah.
8. Pelaksana penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan di wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan administrasi tanah yang telah dikuasai dan/atau milik negara/daerah serta bekerja sama dengan departemen keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga atau instansi lain.
12. Penyelenggara dan pelaksana kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik dalam bidang pertanahan.
15. Pengkajian dan pengembangan di bidang hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan serta pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pertanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi dalam bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.

20. Pembatalan dan pengertian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BPN baik di pusat maupun daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu juga harus dapat melaksanakan Prona dengan baik demi mewujudkan amanat dan cita-cita Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Prona merupakan program pemerintah yang semua anggaran ditanggung APBN, masyarakat hanya perlu menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan agar bisa mengikuti Prona. Program sertifikasi Prona gratis alias tidak ada biaya diutamakan bagi warga ekonomi menengah ke bawah yang jelas tidak mampu mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Namun meskipun biaya pendaftaran tanah ini dilakukan secara gratis, dalam pelaksanaannya tidaklah semudah yang dibayangkan Kantor Pertanahan Kota Blitar masih menemui hambatan dalam melaksanakan program Prona tersebut. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Prona dan bagaimana cara Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut menurut hukum Pertanahan Indonesia .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis menetapkan beberapa permasalahannya yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Agraria di Kota Blitar Menurut Hukum Pertanahan Indonesia?
2. Bagaimana cara Kantor Pertanahan Kota Blitar mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria di Kota Blitar Menurut Hukum Pertanahan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperoleh solusi secara konkrit atas permasalahan yang telah diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut di atas, yaitu:

1. Untuk menemukan, mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Program Nasional Agraria menurut hukum pertanahan Indonesia.
2. Untuk menemukan, mengetahui dan mendeskripsikan hambatan-hambatan dan solusi apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Program Nasional Agraria.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Bahwa hasil penelitian ini berguna dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Agraria. Serta memberikan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa/kalangan akademis mengenai Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, sebagai sarana pembelajaran serta menambah wawasan didalam aplikasi ilmu yang diperoleh selama menyelesaikan studi.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan mendaftarkannya, untuk segera mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional melalui Program Nasional Agraria.
- c. Bagi Kantor Pertanahan Nasional, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah kepada masyarakat terutama pelayanan dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang terdiri dari lima bab yang telah disusun dalam Sistematika Penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penulisan Skripsi; kemudian Perumusan Masalah yang akan diteliti; diuraikan pula Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian baik secara praktis maupun secara teoritis serta diuraikan mengenai Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang akan diuraikan, yaitu; Kajian Umum Tentang Pendaftaran Tanah, Kajian Umum tentang Hak Atas Tanah, serta Kajian Umum tentang Lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

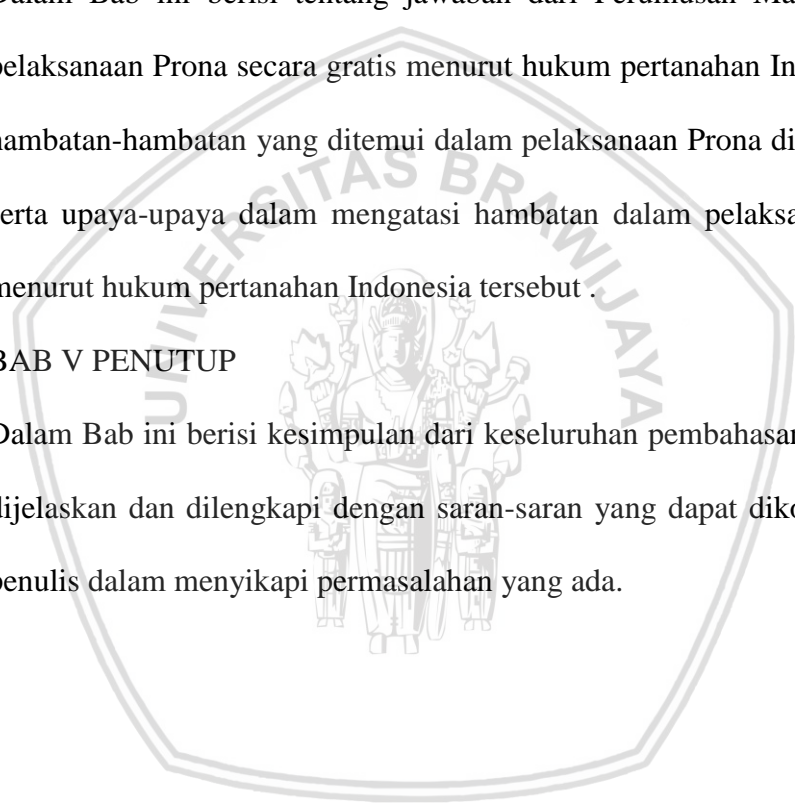
Dalam Bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi, Metode Penelitian terdiri dari: Pendekatan, Alasan Pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel serta Metode Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang jawaban dari Perumusan Masalah, yaitu pelaksanaan Prona secara gratis menurut hukum pertanahan Indonesia dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Prona di Kota Blitar serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Prona menurut hukum pertanahan Indonesia tersebut .

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat berkontribusi penulis dalam menyikapi permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Pendaftaran Tanah

Menurut Budi Harsono (1999:18) memberi batasan tentang tanah berdasarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA, bahwa: “Tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering pula menimbulkan guncangan dalam masyarakat, lalu ia juga yang sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.” Dari pendapat yang dikemukakan oleh Budi Harsono, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena kegunaannya pun juga sangat diperlukan bagi masyarakat terutama dalam pembangunan. Sehingga menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memelihara dan mempertahankannya. Namun, dalam pelaksanaan pembangunannya tanah juga dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan sehingga perlu dikendalikan dengan baik dan benar.

Pendaftaran berasal dari kata Kadaster (cadastre, Perancis) yang berarti suatu register atau suatu unit yang menggambarkan tentang luas, nilai, subyek, atas hak pada suatu bidang tanah.¹ Dengan demikian yang dimaksudkan dengan Kadaster ialah sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 Ayat (2) sub a yaitu terdiri dari pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. Adapun yang dimaksud dengan pendaftaran hak adalah sebagaimana yang diatur dalam

¹ Irawan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arkola, Surabaya, 2002, Hlm. 79

Pasal 19 Ayat (2) sub b dan c, yaitu : yang terdiri dari pendaftaran hak-hak atas tanah, atas peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.²

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pengertian Pendaftaran Tanah ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pada Pasal 1 Ayat (1):

“Pendaftaran tanah merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkelanjutan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, kedalam bentuk peta dan daftar, tentang bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bidang-bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak miliki atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya.”

Menurut Boedi Harsono, Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut:

“Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, yang ada di suatu wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, dalam rangka mewujudkan terciptanya kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti dan pemeliharaannya.”³

Pendaftaran tanah merupakan pencatatan identitas sebidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang nantinya akan menghasilkan sebuah sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat, sehingga jelas jenis haknya, kuatnya, batas-batasnya, keadaannya, letaknya serta

² Ibid, hlm. 56

³ Boedi Harsono, Ibid. hlm 72

pemiliknya. Kewajiban untuk melakukannya pada prinsipnya dibebankan pada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.⁴

2. Penerbitan Sertifikat

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, apa yang tercantum didalam sertifikat terdiri dari salinan buku tanah yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dokumen sampul. Dalam penerbitan sertifikat terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Tahap Pertama

- 1) . Bila tanah berasal dari warisan, mereka yang menerima warisan tanah, baik tanah bekas hak milik adat dan/atau dari hak-hak lainnya, harus melengkapi syarat-syarat:
 - a) Surat tanda bukti hak atas tanah, yang berupa sertifikat hak tanah yang bersangkutan;
 - b) Bila tanah yang bersangkutan belum pernah disertifikatkan, maka harus menyertakan surat tanda bukti hak atas tanah lain, seperti Surat Pajak hasil bumi/petuk D lama dan segel-segel lama atau Surat Keputusan penegasan pemberian hak oleh instansi yang berwenang;
 - c) Surat Keputusan Kepala Desa yang telah mendapat pengakuan Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut ;
 - d) Surat keterangan waris dari instansi berwenang ;
 - e) Surat pernyataan jumlah tanah yang telah dimiliki;
 - f) Kartu Izin Tinggal Sementara (untuk orang asing);

⁴ Maria S. Wsumardjono, **Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi**, Jakarta, Kompas, 2001, hlm. 22

- g) Keterangan pelunasan pajak tanah sampai meninggalnya pewaris.
 - h) Ijin peralihan hak, jika syarat ini diwajibkan kepada para pemilik tanah, yaitu mereka yang mempunyai tanah berasal dari jual beli, hibah, lelang, konversi hak dan lain sebagainya, harus melengkapi diri dengan persyaratan yang sama.
- 2) Bila tanah berasal dari jual beli, harus melengkapi syarat-syarat:
- a) Akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT;
 - b) Sertifikat hak tanah yang bersangkutan;
 - c) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka harus diserahkan bukti atas tanah lainnya, seperti surat pajak atas hasil bumi/petuk D lama atau Surat Keputusan penegasan hak dari instansi yang berwenang;
 - d) Surat Keputusan dari Kepala Desa yang telah diakui Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;
 - e) Surat pernyataan jumlah tanah yang telah dimiliki;
 - f) Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat berwenang;
 - g) Ijin peralihan hak, jika hal ini diisyaratkan.
- 3) Bila tanahnya berasal dari hibah, syarat-syarat tersebut adalah:
- a) Akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT;
 - b) Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan;
 - c) Bila tanahnya belum pernah disertifikatkan, maka diharuskan menyerahkan bukti atas tanah yang lain, seperti surat pajak hasil

bumi/petuk D lama atau surat keputusan penegasan hak dari instansi yang berwenang;

- d) Surat Keputusan dari Kepala Desa yang telah dikuatkan Camat yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut;
 - e) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimiliki;
 - f) Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Bila tanah yang berasal dari lelang:
- a) Kutipan otentik berita acara lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang.
 - b) Sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau/tanda bukti hak lainnya yang sudah diketahui Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat.
 - c) Surat pernyataan tentang jumlah tanah yang telah dimilikinya.
 - d) Keterangan pelunasan/bukti lunas pajak tanah yang bersangkutan.
 - e) Turunan surat keterangan warga negara Indonesia yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - f) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diminta sebelum lelang dilaksanakan.
- 5) Bila tanahnya berasal dari konversi tanah adat, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
- a) Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September tahun 1960 sudah dipungut pajak, yaitu:
 - Surat pajak hasil bumi / petuk D lama /perponding Indonesia dan segel-segel lama.

- Keputusan penegasan/pemberian hak dari instansi yang berwenang.
- Surat asli jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa yang telah dikuatkan oleh Camat yang membenarkan keterangan tentang tanah yang bersangkutan.
- Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dan juga tidak dijadikan sebagai tanggungan utang serta sejak kapan dimiliki.

b) Bagi daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 belum dipungut pajak:

- Keputusan penegasan/pemberian hak tanah yang dibuat oleh instansi berwenang.
- Surat asli jual beli, tukar menukar, hibah, yang dibuat atau disaksikan oleh Kepala Desa.
- Surat Keterangan dari Kepala Desa yang telah dikuatkan oleh Camat yang membenarkan isi keterangan-keterangan tentang tanah yang bersangkutan.
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tidak berada dalam sengketa.

6) Bila tanah yang berasal dari konversi tanah hak barat, syarat-syaratnya:

- a) Grosse akta
- b) Surat ukur

- c) Turunan surat keterangan warga negara yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- d) Kuasa konversi, bila pengkonversian itu dikuasakan pada seseorang.
- e) Surat pernyataan pemilik yang menyatakan bahwa tanah tidak berada dalam sengketa, tidak menjadi tanggungan hutang, sejak kapan dimiliki dan belum pernah dialihkan dengan sesuatu hak kepada pihak lain.

b. Tahap Kedua

Setelah semua persyaratan dipenuhi, selanjutnya diserahkan pada Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat. Tindakan yang dilakukan selanjutnya dilakukan oleh seksi pendaftaran tanah yaitu melakukan pengukuran, pemetakan dan pendaftaran haknya.

c. Tahap Ketiga

Pada tahap ini semua hak atas tanah yang telah dibukukan akan dibuatkan salinan dari buku yang bersangkutan. Salinan buku tanah dan surat ukurnya serta gambar situasi, kemudian dijahit menjadi satu dengan diberi kertas sampul yang bentuknya telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria⁵ yang sekarang diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988.

⁵ Mudjiono, **Politik Agraria Nasional – Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila**, GAMA University Press, Yogyakarta, 1999, Hlm 89-98

3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dibagi menjadi dua yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali serta pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis ialah pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah, berdasarkan rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta pelaksanaannya dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu dan/atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan agar menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah serta sertifikat dengan perubahan yang terjadi kemudian.

4. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, asas pendaftaran tanah ialah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah memiliki arti untuk ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur dengan mudah dapat dimengerti dan dipahami oleh para pihak yang berkepentingan, terutama oleh para pemegang hak atas tanah.

Asas aman dimaksudkan adalah bahwa pendaftaran tanah perlu dilaksanakan secara teliti, cermat dan harus dilakukan oleh seseorang yang profesional sehingga hasil yang dapat menjamin kepastian hukum sesuai tujuan dari pendaftaran tanah.

Asas mutakhir dan terbuka dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan kesinambungan dalam pemeliharaan data-data atas tanah yang bersangkutan. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir dan pasti. Oleh karena itu, perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan seluruh perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir mengharuskan terpeliharanya data-data pendaftaran tanah secara berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar dan pasti setiap saat.

Diselenggarakannya pendaftaran tanah yang efektif akan memungkinkan kepada siapa pun yang berkepentingan dengan mudah dapat membuktikan haknya atas tanah yang dipunyai dan mengetahui hal-hal yang perlu diketahui mengenai tanah-tanah kepunyaan pihak lain, baik dari segi-segi teknis kadaster maupun segi yuridisnya. Tujuan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 adalah sebagai berikut, Pendaftaran tanah bertujuan:

“Untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lainnya yang sudah terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data dalam melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Tertib administrasi berarti juga terselenggaranya penyimpanan seluruh data-data dengan baik dan teratur di Kantor Pertanahan sehingga memudahkan dalam mencari data-data yang dibutuhkan.

5. Obyek Pendaftaran Tanah

Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi :

- a. Seluruh bidang tanah dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
- b. Tanah-tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah-tanah negara.

Kemudian ditambah Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai yang diberikan oleh Negara. Tetapi kemungkinan juga diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah. Tetapi selama belum ada pengaturan tentang tatacara pembebanannya dan disediakan formulir akta pemberiannya, untuk sementara belum ada hak-hak guna bangunan dan hak-hak pakai yang diberikan oleh pemegang hak milik atas tanah. Oleh karena itu, saat ini yang merupakan obyek pendaftaran tanah baru hak-hak guna bangunan dan hak-hak pakai yang diberikan oleh negara. Tanah negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 termasuk obyek yang didaftar.⁶

6. Sistem Pendaftaran Tanah

Sistem pendaftaran tanah mempersalahkan⁷: apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis serta bentuk tanda bukti haknya. Dikenal ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran tanah yaitu:⁸

a. Sistem Pendaftaran Akta (*Registration of deeds*)

Akta adalah sumber data yuridis, karena akta yang didaftarkan Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT), Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat pasif karena ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftarkan.

b. Sistem Pendaftaran Hak (*Registration of Titles*)

Sistem pendaftaran hak merupakan hak yang diciptakan serta perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dan Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT) bersifat aktif karena Pejabat Pendaftaran Tanah (PPT)

⁶ Boedi Harsono, op.cit, hlm 462

⁷ Boedi Harsono, Ibid, hlm 76

⁸ Boedi Harsono, Ibid, hlm 78

harus melakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang didaftarkan.

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak (*registration of titles*), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan fisik yang disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftarkan.⁹

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf serta hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan memasukkannya dalam buku tanah, yang memuat mengenai data yuridis dan fisik bidang-bidang tanah yang bersangkutan dan selama ada surat ukurnya dicatat juga dalam surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatan pada surat ukur tersebut merupakan satu-satunya bukti, bahwa hak yang bersangkutan serta pemegang hak dan bidang tanahnya yang tercantum didalam surat ukur secara hukum telah didaftarkan menurut Peraturan yang telah ada. Untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diterbitkan sertifikat sesuai dengan data fisik yang terdapat didalam surat ukur dan/atau data yuridis yang telah terdaftar didalam buku tanah.¹⁰

⁹ Irawan Soerodjo, op.cit, hlm. 79

¹⁰ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

7. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah

Sistem publikasi sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, karena sistem publikasi dipergunakan untuk menjawab permasalahan:¹¹

Sejauh manakah orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan tersebut, sejauh manakah hukum melindungi kepentingan orang yang melakukan suatu perbuatan hukum tentang tanah yang haknya sudah didaftar, berdasarkan data yang disajikan di Kantor Pejabat Pendaftaran Tanah atau yang tercantum dalam surat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh PPT, jika ternyata data tersebut bukan benar ?

Ada beberapa Sistem Publikasi tanah yang dipakai oleh negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, yaitu:

a. Sistem Publikasi Positif

Menurut sistem publikasi positif, suatu sertifikat tanah yang diberikan adalah berlaku sebagai bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistem positif adalah pendaftaran hak atas tanah itu menjamin dengan sempurna bahwa nama yang tercantum dalam buku tanah bukan dapat dibantah, walaupun ia ternyata bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang bersangkutan.

Kebaikan dari sistem positif adalah :

- 1) Adanya kepastian dari buku tanah.
- 2) Peranan aktif dari pejabat balik nama tanah.

¹¹ Boedi Harsono, Ibid, hlm 80

- 3) Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah dimengerti.

Kelemahan dari sistem positif adalah :

- 1) Peranan aktif pejabat balik nama tanah akan membutuhkan waktu yang lama.
- 2) Pemiliik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan hak atas tanahnya oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri.

b. Sistem Publikasi Negatif

Menurut sistem ini, segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka Pengadilan. Ciri pokok sistem publikasi negatif, ialah bahwa pendaftaran hak atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdapat bukanlah pemilik sebenarnya. Hak dari nama yang tercantum dan terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak sebelumnya.

Ciri lain adalah bahwa pejabat balik nama tanah berperan pasif, artinya pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari surat yang diserahkan kepadanya.

Kebaikan dari sistem publikasi negatif:

- 1) Adanya perlindungan kepada pemegang hak sejati/yang sesungguhnya.

Kelemahan dari sistem publikasi negatif :

- 1) Peranan pejabat balik nama tanah yang pasif sehingga menyebabkan tumpang tindihnya sertifikat tanah.
- 2) Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah sedemikian rupa sehingga kurang dimengerti oleh awam.¹²

Sistem publikasi yang digunakan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif. UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif secara mutlak karena menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan tidak menggunakan sistem publikasi negatif secara mutlak karena kegiatan pemeliharaan dan penerbitan sertifikat hak dilakukan dengan seksama agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹³ Sistem publikasi yang dipergunakan oleh Peraturan Dasar UUPA disebut dengan sistem negatif yang bertendens positif. Pengertian bertendens positif adalah adanya peran aktif pelaksana pendaftaran, antara lain :

- a) Adanya penyelidikan bidang tanah secara teliti dan cermat.
- b) Pengumuman selama 3 bulan untuk pendaftaran tanah tersebut. Pengumuman ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan, jika merasa hak tersebut merugikan dirinya.

¹² Mudjiono, Op.cit, hlm 30-34

¹³ Boedi Harsono, Op.cit, hlm. 481

Adapun ciri-ciri dari sistem negatif bertendens positif, yaitu :

- Nama pemilik tanah yang tercantum dalam daftar buku tanah adalah benar dan dilindungi oleh hukum yang berlaku dan sertifikat merupakan tanda bukti hak yang tertinggi.
- Setiap peristiwa balik nama akan melalui prosedur dan penelitian yang seksama dan memenuhi persyaratan keterbukaan untuk umum.
- Setiap bidang tanah batas-batasnya diukur dan digambarkan dalam suatu peta pendaftaran dengan skala 1:1000, ukuran mana memungkinkan untuk meneliti kembali batas-batas persil bila dikemudian hari terjadi sengketa perbatasan.
- Pemilik tanah yang tercantum dan terdaftar dalam buku tanah dan sertifikat masih dapat diganggu gugat melalui Pengadilan Negeri dan sertifikat masih dapat dicabut dan dibatalkan keabsahannya melalui Pengadilan Negeri atau oleh Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri.
- Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat karena kesalahan administrasi pendaftaran hak atas tanah, melainkan masyarakat yang merasa dirugikan bisa melakukan tuntutan melalui Pengadilan Negeri.

8. Biaya Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, biaya pendaftaran tanah meliputi :

1. Besarnya dan seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah sendiri.
2. Atas permohonan dari yang bersangkutan, Pejabat yang telah ditunjuk dapat membebaskan pemohon baik sebagian maupun seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, jika pemohon dapat membuktikan bukan/tidak mampu membayar biaya tersebut.
3. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, maka akan dibebaskan biaya pendaftaran.
4. Tata cara dalam memperoleh pembebasan biaya pendaftaran tanah telah diatur oleh Menteri.

Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut :

“Pemberian hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Program Nasional Agraria dalam rangka persertifikatan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, persertifikatan tanah dalam rangka Program Nasional Agraria dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertifikat tanah Prona tetap harus membayar biaya administrasi. Yang dimaksud biaya administrasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan Prona.

9. Penyelenggara dan Pelaksana Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pelaksana pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan, kecuali tentang kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada Pejabat lainnya. Kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi tugas Pejabat lain, yaitu kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya seperti pengukuran titik dasar teknik serta pemetaan fotogrametri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Misalnya pembuatan akta PPAT sementara, pembuatan akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau disebut SKMHT oleh notaris, pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang, dan adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Panitia Adjudikasi.

B. Kajian Umum Tentang Program Nasional Agraria

Program Nasional Agraria merupakan suatu usaha pemerintah dengan suatu subsidi untuk melakukan pendaftaran tanah secara massal. Dalam rangka membantu golongan masyarakat ekonomi lemah, usaha penerbitan sertifikat secara massal dilanjutkan. Sehubungan dengan itu oleh pemerintah telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona). Dalam menimbang dari Peraturan tersebut dinyatakan bahwa dalam

rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain bagian-bagiannya.¹⁴

Prona merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan Garis Besar Haluan Negara dan Catur Tertib dibidang pertanahan sebagaimana digariskan dalam REPELITA III. Pada dasarnya Program Nasional Agraria ditekankan kepada ekonomi lemah, sedangkan bagi masyarakat yang tidak atau kurang mampu dibebaskan oleh UU untuk tidak dibebani dengan biaya (Pasal 19 Ayat 4 UUPA).¹⁵

1. Latar Belakang Pelaksanaan Program Nasional Agraria

Pelaksanaan Program Nasional Agraria dilatar belakangi sejumlah faktor, diantaranya:

1.) Faktor Teknis

Selama ini instansi agraria bersifat pasif, menunggu kehadiran anggota masyarakat (pemegang hak atas tanah) yang berkeinginan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya. Dengan cara kerja demikian, maka pekerjaan itu menjadi berjalan sangat lambat. Selain itu dijumpai sementara oknum aparat yang mempunyai mentalitas tidak terpuji, bukan membantu rakyat (pemegang hak atas tanah) tetapi justru membodohnya, yang karena tingkahnya itu timbul citra yang kurang baik terhadap instansi agraria.

2.) Faktor Non Teknis

¹⁴ Dalam Menimbang huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona)

¹⁵ Sudjito, **Persertikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis**, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 158

Menyangkut kepekaan masalah tanah yang turut meningkat, karena dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume pembangunan, permintaan tanah yang luas dan berkualitas baik semakin besar. Sementara tanah semakin sulit didapat terutama di kota-kota besar, keresahan masyarakat karena soal tanah antara lain bersumber juga dari meningkatnya harga tanah, calo tanah dan campur tangan oknum agraria diluar wewenangnyanya. Di tengah itu golongan ekonomi lemah sendiri cenderung menjual atau memudahkan tanahnya kepada golongan ekonomi kuat.¹⁶

Pelaksanaan Program Nasional Agraria adalah demi tercapainya Catur Tertib Pertanahan, yang meliputi :

a. Tertib Hukum Pertanahan

Bertujuan agar setiap tanah mempunyai sertifikat, sehingga tanah tersebut mempunyai kepastian hukum dan juga hak yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa peraturan hukum pertanahan sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya sertifikat tanah, diharapkan sengketa-sengketa pertanahan dapat dihindari.

b. Tertib Administrasi Pertanahan

Memiliki tujuan agar meningkatkan mutu pelayanan Kantor Pertanahan kepada masyarakat dengan cara yang cepat, mudah dan biaya yang murah bagi pemohon hak atas tanah.

Adapun maksud dari cepat, mudah dan biaya murah, adalah :

- 1) Cepat, bahwa pelaksanaannya sudah diprogramkan dan harus selesai tepat pada waktunya, sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

¹⁶ Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto, **Eksistensi PRONA sebaga Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 67

- 2) Mudah, petugas pelaksana aktif di lokasi yang telah ditentukan sehingga pemohon tidak harus datang ke Kantor Pertanahan setempat, sehingga proses permohonan hak atas tanah itu dapat dilakukan dengan mudah oleh masyarakat.
- 3) Murah, dimana biaya yang dibebankan kepada pemohon hak atas tanah relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan Prona, masyarakat dibebaskan dari biaya alias gratis selama seluruh persyaratan yang menjadi kewajiban terpenuhi.

Dengan adanya Prona yang dilaksanakan tanpa biaya, cepat dan mudah tersebut, diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dengan golongan ekonomi lemah.

c. Tertib Penggunaan Tanah

Bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana, sehingga pemanfaatan tanah secara maksimal dapat diperoleh, keseimbangan antara berbagai keperluan dan bersifat selamanya. Dengan demikian, penggunaan tanah bisa mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Saat ini banyak terjadi orang dan badan hukum yang menguasai tanah tanpa berusaha untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan disekitarnya. Padahal dalam Pasal 15 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sudah dijelaskan secara tegas bahwa memelihara kesuburan serta mencegah kerusakan merupakan kewajiban setiap orang atau badan hukum, instansi, yang mempunyai hubungan dengan tanah itu, serta harus memperhatikan pihak-

pihak ekonomi lemah. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

2. Kriteria Subyek Proyek Operasi Nasional Agraria

Subyek Program Nasional Agraria adalah masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga golongan menengah. Masyarakat ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Prona adalah para pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti, nelayan, pedagang, petani, peternak, pelukis, pengrajin, buruh musiman dan lain sebagainya. Adapun pekerja dengan penghasilan tetap adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai perusahaan dengan penghasilan setiap bulannya sama atau dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;
- b. Veteran, PNS, TNI dan POLRI dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir;
- c. Istri/Suami Veteran/PNS/TNI/Polri dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan pangkat terakhir serta akta nikah;
- d. Pensiunan PNS, TNI/Polri dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan pensiun;
- e. Janda/duda pensiunan PNS, TNI/Polri dibuktikan dengan fotocopy Surat Keputusan pensiunan janda/duda dan akta nikah.

3. Kriteria Penetapan Lokasi

Dalam menetapkan lokasi Prona perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan yang tersedia. Lokasi kegiatan harus ditujukan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai berikut:

- a. Desa miskin atau tertinggal;
- b. Daerah pertanian subur yang berpotensi untuk berkembang;
- c. Daerah penyangga kota, pinggiran kota/daerah miskin kota;
- d. Daerah-daerah pengembangan ekonomi rakyat;
- e. Daerah yang terjadi lokasi bencana alam;
- f. Daerah pemukiman padat penduduk yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan;
- g. Daerah di luar sekeliling transmigrasi;
- h. Daerah penyangga Taman Nasional ;
- i. Daerah permukiman baru yang terkena pengembangan prasarana umum /relokasi akibat dilanda bencana alam.

Selain itu dalam menetapkan lokasi wilayah Desa/Kelurahan Prona, harus memperhatikan tersedianya infrastruktur pertanahan untuk menunjang proses pelaksanaan Prona, antara lain:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
- c. Peta Penatagunaan Tanah.
- d. Peta Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Fotogrametris).

- e. Infrastruktur Titik Dasar Teknik dan atau Peta Dasar Pendaftaran.
- f. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- g. Kendaraan dan peralatan Larasita, serta
- h. Infrastruktur lainnya.

4. Kriteria Obyek Proyek Nasional Agraria

- a. Tanah sudah dikuasai secara fisik;
- b. Memiliki bukti kepemilikan;
- c. Bukan tanah warisan yang belum dibagi;
- d. Bukan tanah dalam keadaan sengketa;
- e. Lokasi tanah berada di wilayah Kabupaten/Kota lokasi peserta program yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- f. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek Prona.

Kriteria harus sesuai, apabila tidak sesuai kriteria yang ditentukan pemohon tidak boleh mengajukan permohonan hal melalui Program Nasional Agraria.

5. Luas dan Jumlah Tanah Obyek Program Nasional Agraria

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona) Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Tanah yang dapat menjadi objek Prona adalah:
 - a. Tanah bekas tanah milik tanah adat ;
 - b. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara; atau
 - c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.

- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa tanah non pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.
- (3) Untuk tanah non pertanian di ibukota kabupaten/kota/kota administratif di pulau jawa dan/atau ibukota provinsi, dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 m²(dua ratus meter persegi).
- (4) Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi objek Prona dengan ketentuan:
 - a. Di pulau jawa, paling luas 1 ha (satu hektar); dan
 - b. Diluar pulau jawa, paling luas 2 ha (dua hektar)
- (5) Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
 - a. Di pulau jawa, paling luas 2 ha (dua hektar) ; dan
 - b. Di luar pulau jawa, paling luas 4 ha (empat hektar)
- (6) Luasan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan yang dapat menjadi objek Prona paling luas 500 m²(lima ratus meter persegi).¹⁷

6. Tahapan Pelaksanaan Program Nasional Agraria

Pelaksanaan Prona dilaksanakan dengan beberapa kegiatan atau tahapan-tahapan, yaitu :

- a. Persiapan :
 - 1) Rencana Kerja
 - 2) Tujuan pembuatan rencana kerja

¹⁷ Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona)

- 3) Dasar penyusunan rencana kerja
- b. Pelaksanaan :
 - 1) Penetapan lokasi desa
 - 2) Pengolahan data
- c. Pengawasan :
 - 1) Pengawasan Keuangan
 - 2) Pengawasan Operasional 33
- d. Pelaporan :
 - 1) Pelaporan pertanggungjawaban proyek (ekstern)
 - 2) Pelaporan intern

7. Sumber Biaya Proyek Program Nasional Agraria

Biaya pelaksanaan kegiatan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Anggaran yang dimaksud digunakan untuk biaya :

- a. Penyuluhan;
- b. Pengumpulan data-data (alat bukti/alas hak) ;
- c. Pengukuran bidang-bidang Tanah;
- d. Pemeriksaan Tanah;
- e. Penerbitan Surat Keputusan Hak atau Pengesahan Dat Fisik dan yuridis;
- f. Penerbitan Sertifikat;
- g. Supervisi dan Pelaporan.

Sedangkan untuk biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta Prona masing-masing.¹⁸



¹⁸<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisisi-Aset/Program-Program/Sertipikasi-PRONA>, diakses tanggal 9 November 2017 pukul 11.13 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *penelitian empiris*, alasan penulis memilih metode penelitian empiris adalah untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap dan tindakan hukum di dalam suatu lembaga dengan cara mengkaji peraturan perundangan dan menghubungkannya dengan praktek yang terjadi di lapangan. Yang kemudian saling dikaitkan untuk mengetahui cara yang telah dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada pelaksanaan Program Nasional Agraria.

B. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam serta memahami hambatan yang dihadapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar dalam pelaksanaan Program Nasional Agraria serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Blitar yakni di Kantor Pertanahan Nasional Kota Blitar yang beralamat di Jalan Sodanco Supriyadi No. 15 Kota Blitar. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaan Program Nasional Agraria secara gratis di Kota Blitar masih mengalami hambatan. Hambatan ini tentunya berdampak pada penyelesaian

Prona yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Alasan penulis memilih kota Blitar sebagai lokasi penelitian adalah untuk mengetahui hambatan apa saja yang harus dilalui oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar dalam mewujudkan pelaksanaan Program Nasional Agraria (Prona) sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis. Data primer ini diperoleh dari hasil catatan wawancara yang dilakukan terhadap Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar.
2. Data sekunder, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dalam hal ini yang dimaksud bahan pustaka dapat dengan membaca buku, literatur, undang-undang, dokumen, jurnal dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan apa yang akan dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara dalam penggalian informasi yang sangat penting dalam penelitian yang memerlukan seorang narasumber sebagai obyek pencarian informasi. Seorang peneliti menggunakan teknik wawancara ini dalam berbagai situasi untuk mengumpulkan informasi dari narasumber. Dengan tujuan agar menciptakan suasana akrab antara peneliti dengan informan. Sehingga keakraban dapat dilakukan guna mendapatkan data yang rinci. Selain mendengarkan dan menulis, merekam juga dapat dilakukan dalam proses wawancara yang sedang berlangsung namun peneliti harus meminta ijin terlebih

dahulu kepada informan guna kelancaran dalam penggalian informasi melalui wawancara tersebut.

F. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai Penanggungjawab Prona, Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Wakil Penanggungjawab Prona serta Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah sebagai Koordinator Administrasi Prona di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, selanjutnya diadakan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis segala sesuatu yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan sehingga memberikan data yang seteliti mungkin. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga dalam penjelasannya nanti akan diharapkan dapat memperjelas pokok permasalahan.¹

Analisis secara deskriptif analisis merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Bahwa tujuan deskriptif

¹ H.B. Sutopo, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988 hlm. 37

ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

H. Definisi Operasional

Untuk tidak mengaburkan pengertian dari istilah yang digunakan maka dalam penelitian ini batasan operasional sebagai berikut :

1. *Badan Pertanahan Nasional*, Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara menyeluruh yaitu nasional, regional dan sektoral sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²
2. *Pendaftaran Tanah*, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terusmenerus, berkelanjutan dan teratur, kegiatan itu adalah pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis kedalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang tanah yang telah memiliki hak dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya..³
3. *Program Nasional Agraria*, adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset yang pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang terdiri dari adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat atau tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal. Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan kepada segenap masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah

² Pasal 2 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

dan menyelesaikan secara tuntas terhadap seluruh sengketa-sengketa pertanahan yang bersifat strategis.⁴



⁴<http://www.bpn.go.id/Program/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>, diakses tanggal 10 Maret 2017 pukul 10.00 WIB

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria , Kota Lahar dan Kota Proklamator secara legal-formal didirikan pada tanggal 1 April 1906. Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Blitar. Walaupun status pemerintahannya adalah Pemerintah Kota, tidak serta-merta menjadikan mekanisme kehidupan masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar. Memang ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai kota Blitar adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari permukaan air laut, pada koordinat 112°14'– 112°28' Bujur Timur dan 8,2°– 8,8° Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena Kota Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari Ibukota Propinsi Surabaya.¹

Secara administrasi Kota Blitar dikelilingi oleh Kabupaten Blitar yang memiliki tiga kecamatan, yaitu Sukorejo, Sananwetan, dan Kepanjenkidul

¹<http://www.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4>, diakses tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB

- a. Kecamatan Sukorejo terdiri atas tujuh kelurahan, yaitu Sukorejo, Pakunden, Tlumpu, Karangsari, Blitar, Jati Turi, dan Tanjungsari.
- b. Kecamatan Sananwetan terdiri atas tujuh kelurahan, yaitu Sananwetan, Karangtengah, Bendogerit, Plosokerep, Rembang, Klampok, dan Gedog.
- c. Kecamatan Kepanjenkidul terdiri atas tujuh kelurahan, yaitu Kepanjenkidul, Kepanjenlor, Sentul, Ngadirejo, Tanggung, Bendo dan Kauman.

Tabel 1
Rincian Jumlah Kelurahan dan Luas Masing-Masing Kecamatan di
Kota Blitar

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas	
			Km ²	% Wilayah
1.	Sukorejo		9.93	30,46
		Tlumpu	1.02	3,13
		Karangsari	0.88	2,7
		Turi	0.51	1,56
		Blitar	1.33	4,08
		Sukorejo	1.47	4,51
		Pakunen	2.26	6,93
		Tanjungsari	2.46	7,55
2.	Kepanjenkidul		10.50	32,21
		Kepanjenkidul	0.87	2,67
		Kepanjelore	0.61	1,87
		Kauman	0.68	2,09
		Bendo	1.52	4,66

		Tanggung	2.23	6,84
		Sentul	2.68	8,22
		Ngadirejo	1.91	5,86
3.	Sananwetan		12.16	37,31
		Rembang	0.84	2,58
		Klampok	1.53	4,69
		Plosokerep	1.25	3,84
		Karangtengah	1.80	5,52
		Sananwetan	2.13	6,54
		Bendogerit	1.96	6,01
		Gedog	2.65	8,13
Kota Blitar			28.52	100

Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota

Blitar/Governance Section of Blitar City Government tahun 2015

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan diatas, dapat terlihat bahwa Kecamatan Sananwetan merupakan wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 12.16 Km² yaitu mencakup 37,31 % wilayah Kota Blitar. Sedangkan Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu seluas 9.93 Km² yaitu 30,46 % dari wilayah Kota Blitar.

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Nasional Agraria di Kota Blitar

Kota Blitar merupakan daerah dengan luas wilayah 32,58 km². Dengan lahan yang kecil tersebut perlu adanya suatu pengaturan atau kebijakan yang mengatur mengenai pertanahan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik lahan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi². Untuk mewujudkan semua itu, masyarakat pemilik lahan diharapkan harus segera mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Namun dalam prakteknya tidaklah semua masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya dikarenakan faktor ekonomi, banyak masyarakat dengan ekonomi lemah yang tidak mampu untuk membayar biaya pendaftaran tanah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, penyelenggara Prona bertugas memproses pensertifikatan tanah secara massal sebagai upaya mewujudkan Catur Terib di Bidang Pertanahan. Kegiatan Prona pada dasarnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Program ini dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-pertanahan yang bersifat strategis. Tujuan pelaksanaan Prona adalah untuk memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka mewujudkan percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia³.

Di Kota Blitar sendiri pelaksanaan Prona telah dilaksanakan sangat lancar dan sesuai yang direncanakan, banyak masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya program ini. Masyarakat juga berharap Prona terus berlanjut karena masih banyak masyarakat dengan ekonomi lemah yang belum memiliki sertifikat. Kantor Pertanahan Kota Blitar sebagai pelaksana Prona pada tiap tahunnya selalu

² Samun Ismaya, Op.cit, hlm.2

³ Samun Ismaya, **Hukum Administrasi Pertanahan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hlm. 129

menyelesaikan pelaksanaan program ini sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Pertanahan Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi satu Kepala Subbagian Tata Usaha dan lima Kepala Seksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
- c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
- d. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan.
- e. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

Seluruh seksi ini memiliki tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk penanggungjawab Prona diketuai oleh Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan. Demi lancarnya pelaksanaan Prona seluruh seksi harus saling bekerjasama agar memudahkan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, lokasi-lokasi dilaksanakannya bisa saja lebih dari satu kali masuk daftar sebagai lokasi pelaksanaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, namun semua itu dimaksudkan agar seluruh masyarakat yang menjadi peserta bisa mendapatkan sertifikat secara keseluruhan.

Pelaksanaan Prona memang berbeda dengan pelaksanaan pendaftaran tanah pada umumnya. Perbedaan utama terletak pada biayanya yang gratis karena sudah ditanggung oleh APBN. Selain itu waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan dengan pendaftaran tanah biasa yang hanya memakan waktu beberapa bulan saja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

Pada tahap ini bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung adalah Kantor Pertanahan Kota Blitar turun langsung ke lokasi pelaksanaan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan menjelaskan secara rinci mengenai Prona supaya masyarakat mudah memahami sehingga mau mengikuti program tersebut. Dalam melakukan penyuluhan secara langsung, Kantor Pertanahan Kota Blitar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Kota Blitar demi meyakinkan masyarakat bahwa Prona dilaksanakan secara gratis karena sudah dibiayai oleh Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN), peserta hanya harus mengeluarkan biaya persyaratan yang diwajibkan. Selain itu kerjasama ini untuk menghindari pungutan-pungutan yang akhir-akhir ini marak terjadi dengan mengatasnamakan Prona. Penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan media, baik media cetak maupun elektronik. Namun lebih bagus dan efektif penyuluhan dilakukan secara langsung agar masyarakat lebih memahami tujuan dan maksud diadakannya Prona.

a. Pengumpulan Data Yuridis/Inventarisasi Subjek-Objek Tanah dan Penetapannya

Dalam tahap ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, pihak pertama disebut sebagai kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibna). Kelompok ini dibentuk oleh Kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan Prona terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota. Anggota Pokmasdartibna merupakan orang yang ditugaskan oleh Kelurahan yaitu orang-orang penting yang berada ditengah masyarakat, seperti ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) serta pihak Kelurahan itu sendiri. Pokmasdartibna memiliki tugas yaitu menentukan peserta Prona kemudian mengumpulkan

persyaratan yang menjadi kewajiban peserta. Berikut persyaratan yang menjadi kewajiban peserta:

- 1) Foto copy KTP dan KSK pemohon
- 2) Asli petok D atau foto copy Letter C/Kutipan C Desa
- 3) Melampirkan bukti-bukti asli kepemilikan/perolehan tanah antara lain, Akta Jual Beli/Hibah/Tukar Menukar/Surat Keterangan Waris/Segel/Kwitansi/Surat Pernyataan di Bawah Tangan.
- 4) Melampirkan riwayat tanah yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah
- 5) Melampirkan surat keterangan yang diperlukan
- 6) Melampirkan SPPT/PBB
- 7) Melampirkan permohonan sebagai berikut:
 - a) Permohonan penertiban sertifikat;
 - b) Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
 - c) Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
 - d) Surat pernyataan tanah tidak dalam jaminan.
 - e) Menunjukkan letak dan batas tanah yang dimohon
 - f) Memasang tanda batas bidang tanah yang dimohon
 - g) Menyerahkan bukti setor BPHTB dan PPh

Setelah persyaratan terkumpul tim pengumpul data yuridis (Puldadis) mengecek segala persyaratan peserta, apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi maka persyaratan akan dikembalikan kepada peserta dan diharapkan peserta untuk segera melengkapinya. Dengan kata lain puldadis bertugas sebagai *quality control* terhadap persyaratan peserta Prona. Setelah persyaratan lengkap, Pokmasdartibna akan segera mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kota Blitar.

b. Penetapan Peserta Prona

Seperti yang telah diuraikan di atas, yang menentukan peserta Prona dan mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kota Blitar adalah kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan (Pokmasdartibna) hal ini karena merekalah yang mengetahui siapa saja yang pantas untuk mengikuti Prona.

Secara umum terdapat 3 golongan peserta yaitu:

1) Perorangan/Individu

Peserta kegiatan Prona perorangan/individu diutamakan pemilik tanah dari masyarakat ekonomi lemah sampai ekonomi menengah.

2) Nadzir wakaf bai perorangan maupun badan hukum.

3) Badan Hukum

Yang dapat mengikuti kegiatan Prona adalah badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang tidak melakukan usaha untuk mencari keuntungan serta penggunaan tanah yang dimohon gunakan untuk keperluan peribadatan panti asuhan dan panti jompo.

c. Pengukuran dan Pemetaan

Pada tahap ini petugas dari Panitia A melakukan pengukuran terhadap bidang tanah milik masyarakat yang akan didaftarkan melalui Prona. Tanah-tanah yang di ukur tersebut kemudian diberi tanda batas. Penetapan tanda batas tersebut dilakukan agar diketahui letak tanah, luas tanah pemegang Hak Atas Tanah dan batas antara pemilik tanah dengan bidang tanah lainnya.

Pengukuran dilaksanakan secara bertahap oleh tim panitia A yang terdiri dari Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Blitar atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar disaksikan oleh pemilik tanah dan aparat Kelurahan setempat pada waktu yang telah ditentukan. Apabila pemilik tanah tidak berada di tempat pada saat pengukuran, pengukuran terhadap tanah

bersangkutan tetap dilanjutkan apabila pemilik memberikan kuasa kepada isteri, anak atau pihak lainnya untuk menjadi saksi pengukuran.

- d. Peta Bidang dan Cetak Surat Ukur
- e. Pemeriksaan Tanah
- f. Pengumuman
- g. Pembuatan dan Penertiban Sertifikat
- h. Penyerahan Sertifikat
- i. Laporan Akhir dan Serah Terima Hasil Proyek

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria Secara Gratis di Kota Blitar

1. Hambatan Intern

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Blitar, yaitu dalam tenaga pengukuran. Kantor Pertanahan Kota Blitar selalu kewalahan dalam menangani hambatan ini dikarenakan banyaknya jumlah bidang tanah yang harus diukur namun tidak didukung ketersediaan sumber daya manusia di bidang pengukuran. Pengukuran merupakan bagian yang sangat vital dalam pembuatan sertifikasi tanah sedikit pun. Apabila dalam pengukuran terjadi kesalahan, maka akan menimbulkan sengketa yang akan merugikan pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pengukuran harus dilakukan oleh orang yang telah mengerti dan memahami dalam melakukan pengukuran.

2. Hambatan Ekstern

Selain hambatan intern, terdapat beberapa hambatan eksternal yang harus dilalui oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam mensukseskan pelaksanaan Prona secara gratis/yang dibiayai oleh APBN, yaitu:

- a. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang meminta bayaran/pungutan liar kepada masyarakat dalam pelaksanaan Prona padahal sudah jelas bahwa program ini gratis atau tanpa biaya, masyarakat hanya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya ingin mengikuti Prona tidak jadi mengikuti karena tingginya pungutan yang diminta. Mundurnya peserta akan mempengaruhi jumlah kuota yang harus dipenuhi oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar.
- b. Dari Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibna) sering kurang teliti dalam menyeleksi kelengkapan berkas para peserta. Hal tersebut dikarenakan banyaknya berkas-berkas yang harus diteliti yang membuat Pokmasdartibna kadang melewati berkas yang menjadi kewajiban peserta. Jika permasalahan ini terus berlanjut maka akan berdampak penyelesaian Prona yang tidak sesuai jadwal, karena apabila berkas kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada peserta dan hal tersebut akan memakan waktu. Sementara waktu semakin sempit bagi Kantor Pertanahan Kota Blitar untuk menyelesaikan Prona.
- c. Peningkatan pajak yang semakin tahun semakin meningkat. Sama seperti pungutan liar, hal ini akan membuat peserta Prona mundur dari kepesertaan dikarenakan pajak yang terlalu tinggi. Hambatan ini merupakan hambatan yang baru terjadi yang ditemui oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar karena pada tahun-tahun sebelumnya pajak belum terlalu tinggi sehingga tidak mempengaruhi minat peserta. Apabila setiap tahun pajak dinaikkan Kantor Pertanahan Kota Blitar akan merasa sangat kesulitan dalam mencapai target pelaksanaan Prona yang sudah ditentukan baik waktu dan jumlah bidangnya.

3. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Nasional Agraria Secara Gratis di Kota Blitar

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden No,10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional di seluruh Republik Indonesia harus mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, kebijakan teknis, perencanaan dan program, penyelenggaraan administrasi pertanahan dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, penatagunaan tanah, reformasi agraria, penguasaan, dan pemilikan hak atas tanah, termasuk pemberdayaan masyarakat. Bahkan lembaga ini salah satu misinya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

Dengan adanya peraturan yang mengharuskan seluruh Kantor BPN mampu memegang kendali perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, maka Kantor Pertanahan Kota Blitar diharapkan bias melaksanakan Prona demi terciptanya ketertiban administrasi di bidang pertanahan. Fungsi Kantor Pertanahan Kota Blitar adalah instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan, Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29, 30 dan 31 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Blitar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah.

Kantor Pertanahan Kota Blitar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang ada di Kota Blitar.

Oleh karena itu segala hambatan-hambatan yang ada selama pelaksanaan Prona harus bias diatasi oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memperkecil hambatan-hambatan tersebut yang rutin dilakuakn setiap ada hambatan pada saat dilaksanakannya Prona, upaya untuk memperkecil hambatan-hamabatan itu antara lain:

1. Solusi Intern

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kota Blitar menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer D1. Anamun tidak sembarangan tenaga honorer yang digunakan, tenaga pengukuran honorer harus berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Di Kantor Pertanahan Kota Blitar saat ini terdapat 3 orang tenaga honorer yang berasal dari STPN yang bias diandalkan untuk membantu pengukuran selama pelaksanaan Prona. Dengan adanya tenaga honorer tersebut pekerjaan pengukuran bias dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan Prona tiap tahunnya selalu berjalan sesuai target waktu.

2. Solusi Ekstern

Berikut solusi ekstern yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam menghadapi hambatan pelaksanaan Prona:

- a. Agar masyarakat tidak dikenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, Kantor Pertanahan Kota Blitar mengajak Kejaksaan dan Kapolres Kota Blitar dalam penyuluhan dan juga untuk mendampingi selama proses pelaksanaan Prona selesai. Kantor Pertanahan menghimbau agar

masyarakat jangan mau jika ada oknum yang meminta pungutan uang karena biaya pendaftaran, pengukuran dan sampai penerbitan sertifikatnya segala biaya sudah ditanggung oleh APBN. Dengan adanya kerjasama antara Kejaksaan dan Kapolres dalam pengawal pelaksanaan Prona, diharapkan tidak ada lagi oknum yang berani meminta bayaran kepada masyarakat sebagai alasan untuk mempercepat pelaksanaan Prona.

- b. Penanggungjawab Prona menghimbau seluruh anggota Pokmasdartibna agar lebih teliti dalam menyeleksi berkas-berkas yang menjadi persyaratan peserta. Selain itu Pokmasdartibna juga harus saling berkoordinasi dengan Puldadis supaya kesalahan-kesalahan dalam proses seleksi kelengkapan berkas akan memperlambat proses-proses selanjutnya. Hal tersebut membuat molornya pengerjaan pembuatan sertifikat Prona.
- c. Dalam mengatasi masalah pajak yang semakin meningkat, Kantor Pertanahan Kota Blitar bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) agar masyarakat tetap bias membayar pajak meskipun sedikit mahal yaitu dengan cara mencicil pembayaran pajak. Dispenda Kota Blitar mengeluarkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa masyarakat peserta Prona bisa membayar pajak dengan cara dicicil. Penetapan kebijakan ini tentunya dimaksudkan agar masyarakat tetap mau mengikuti Prona meskipun pajaknya mahal, selain itu kebijakan ini juga akan memudahkan Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam menyelesaikan pelaksanaan Prona karena masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk mendaftarkan tanahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kantor Pertanahan Kota Blitar dalam menyelesaikan Program Nasional Agraria mengalami hambatan selama pelaksanaannya. Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Kantor Pertanahan Kota Blitar memiliki solusi yang sangat efektif sehingga membuat Prona tetap bisa berjalan pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang ditemui adalah:

1. Hambatan Intern

Kurangnya tenaga pengukur yang ada di Kantor Pertanahan Kota Blitar. Karena kurangnya tenaga pengukuran membuat pengerjaan Prona tidak bisa berjalan sesuai target waktu yang ditentukan.

2. Hambatan Ekstern

- a. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang meminta bayaran/pungutan liar kepada masyarakat padahal sudah jelas bahwa Prona gratis atau tanpa biaya karena biayanya sudah ditanggung oleh APBN.
- b. Dari Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibna) sering kurang teliti dalam menyeleksi kelengkapan berkas para peserta Prona. Jika permasalahan ini terus berlanjut maka akan berdampak penyelesaian Prona yang tidak sesuai jadwal, karena apabila berkas kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada peserta dan hal tersebut akan memakan waktu.
- c. Peningkatan pajak yang semakin tahun semakin meningkat, hal ini akan membuat para peserta mundur dari kepesertaan dikarenakan pajak yang terlalu tinggi. Apabila setiap tahun pajak dinaikkan Kantor Pertanahan Kota Blitar akan merasa

sangat kesulitan dalam mencapai target pelaksanaan Prona yang sudah ditentukan baik waktu dan jumlah bidangnya.

Untuk mengatasi hambatan yang telah disebutkan diatas, berikut cara yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Blitar:

1. Solusi Intern

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kota Blitar menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer D1. Namun tidak sembarangan tenaga honorer yang digunakan, tenaga pengukuran honorer harus bersal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Saat ini terdapat 3 orang tenaga honorer yang berasal dari STPN yang bisa diandalkan untuk membantu pengukuran selama pelaksanaan Prona. Dengan adanya tenaga honorer tersebut pekerjaan pengukuran bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan Prona tiap tahunnya selalu berjalan sesuai target waktu.

2. Solusi Ekstern

- a. Penanggungjawab pelaksanaan Prona menghimbau seluruh anggota Pokmasdartibna agar lebih teliti dalam menyeleksi berkas-berkas yang menjadi persyaratan peserta Prona. Selain itu Pokmasdartibna juga harus saling koordinasi dengan Puldadis supaya kesalahan-kesalahan dalam proses seleksi berkas bisa diminimalisir.
- b. Agar masyarakat tidak sering dikenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, Kantor Pertanahan Kota Blitar mengajak Kejaksaan dan Kapolres Kota Blitar dalam penyuluhan dan juga sebagai pendamping selama proses pelaksanaan Prona. Dengan adanya kerjasama antara Kejaksaan dan Kapolres dalam pengawal pelaksanaan Prona, diharapkan tidak ada lagi oknum yang berani meminta bayaran kepada masyarakat sebagai alasan untuk mempercepat pelaksanaan Prona.
- c. Dalam mengatasi masalah pajak yang semakin meningkat, Kantor pertanahan Kota Blitar bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sehingga Dispenda

Kota Blitar mengeluarkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa masyarakat peserta Prona bisa membayar pajak dengan cara dicicil.

B. Saran

Kantor Petanahan Kota Blitar harus dapat mengatasi semua hambatan yang ada selama pelaksanaan Program Nasional Agraria. Dari hambatan intern sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Blitar memanfaatkan tenaga honorer dibidang pengukuran lebih banyak lagi, tujuannya adalah supaya proses penyelesaian pengukuran bisa dilakukan lebih cepat. Kemudian dari segi hambatan ekstern, bagi para oknum yang terbukti melakukan pungutan liar kepada masyarakat sebaiknya segera diberi tindakan tegas supaya tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan karena ulah oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Selain itu dihimbau kepada masyarakat yang mengikuti Program Nasional Agraria agar berani melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terdapat oknum yang melakukan pungutan liar.

Untuk masalah Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan yang sering kurang teliti dalam melakukan penyeleksian berkas, sarannya adalah dengan menempatkan anggota Kantor Pertanahan yang mengerti dan memahami mengenai kelengkapan persyaratan Program Nasional Agraria. Antara kedua belah pihak harus saling berkoordinasi lebih baik lagi agar kesalahan-kesalahan dalam proses seleksi berkas dapat diminimalisir. Dan yang terakhir untuk permasalahan pajak yang semakin tahun semakin tinggi sebaiknya Kantor Pertanahan Kota Blitar kembali berunding dengan Dinas Pendapatan Daerah supaya masyarakat diberikan keringanan yang lebih meringankan daripada harus menyicil pajak yaitu dengan memberikan subsidi pajak sehingga beban pembayaran pajak yang harus ditanggung bisa lebih ringan lagi. Dengan

adanya subsidi pajak masyarakat akan merasa senang, mereka tidak akan ragu apalagi mundur dalam keikutsertaan dalam Program Nasional Agraria.

Semua hambatan pasti ada solusi dan cara mengatasinya, dengan adanya solusi dalam mengatasi segala hambatan yang ada, maka pelaksanaan Program Nasional Agraria akan bisa dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Tidak peduli bagaimana sulitnya hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Blitar harus bisa mengatasinya. Semakin cepat hambatan diatasi, maka proses penyelesaian Program Nasional Agraria juga akan semakin cepat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AP. Perlindungan, **Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria**, Bandung, Alumni Bandung, 1984
- Arie Sukanti Hutagalung, dan Markus Gunawan, **Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia: sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya Jilid 1**, Djambatan, Jakarta, 2008
- Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto, **Eksistensi PRONA sebagai Pelaksanaan Mechanism Fungsi Agraria**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Effendi Perangin, **Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, Cet. III, Rajawali, Jakarta, 1991
- H.B. Sutopo, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988
- Iman Sudiyat, **Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang**, Badan Pertanahan Nasional, 1982
- Irawan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arkola, Surabaya, 2002
- Maria S.W Sumardjono, **Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi**, Kompas, Jakarta, 2001
- Mudjiono, **Politik Agraria Nasional – Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila**, GAMA University Press, Yogyakarta, 1999
- Suharsimi Arukinto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta: RinekaCipta, 1998
- Samun Ismaya, **Pengantar Hukum Agraria**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Samun Ismaya, **Hukum Administrasi Pertanahan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Sudjito, **Persertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987

Yudhi Setiawan, **Hukum Pertanahan Teori Dan Praktik**, Bayumedia, Malang, 2010

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (Prona)

Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Skripsi

Syarie Tri Anggraeni, “*Pelaksanaan Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui*

Proyek Nasional Agraria (Studi di Kelurahan Banungrejosari Kecamatan

Sukun Kota Malang)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang,

2008

Internet

<http://www.blitarkota.go.id/index.web.php?p=profil&id=4>, diakses tanggal 14 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB



EMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Gracin Istady
No. Induk : 115010107113034
Judul Skripsi : Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) Secara Gratis Di Kota Blitar
Bimbingan mulai :
Bimbingan selesai :

Nama Dosen Pembimbing Utama : Lufti Effendi, SH, MHum
Nama Dosen Pendamping : Agus Yulianto, SH, MH.
SK. Dekan : No. 453 Tahun 2017
Tgl. 22 Mei 2017

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
26 Juli 2017	Bab I/II/III dan rumus dan penulisan 26/7/2017	Bab I/II/III direvisi format skripsi 26/7/2017	A
16 Agustus 2017	Bab I/II/III dan rumus 26/8/2017	Bab I/II/III / ACC 16/8/2017	A
	Bab IV/II direvisi 26/8/2017	Bab IV /V dikerjakan 14/11/2017	A
14 November 2017	Bab IV 26/11/2017	Bab V 23/11/2017	A
	Bab V 23/11/2017	Bab V ACC 23/11/2017	A

Mengetahui
Ketua Bagian

Dosen Pembimbing Pendamping
.....

Malang, 23-7-2018
Dosen Pembimbing Utama
.....




KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 453 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Lutfi Effendi, SH.M.Hum.; Agus Yulianto, SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Gracia Istady NIM 115010107113034**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Mei 2017
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001